

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN APLIKASI KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan monitoring evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang handal, diperlukan Tim untuk merumuskan dan menyusun strategi dan implementasi integrasi sistem monitoring evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan aplikasi keuangan pusat dan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN APLIKASI KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. merumuskan data dan informasi yang perlu diintegrasikan antara Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi terkait proses implementasi integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memantau pelaksanaan Implementasi integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Integrasi Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG TIM INTEGRASI
 SISTEM MONITORING-EVALUASI
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 DENGAN APLIKASI KEUANGAN PUSAT
 DAN DAERAH

NOMOR : 130 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
 TIM INTEGRASI SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 DENGAN APLIKASI KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	1. Roni Dwi Susanto	750.000
		2. Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	1. Gusti Agung Aju Diah A.	500.000
		2. Emin Adhy Muhaemin	500.000
		3. Hermawan	500.000
		4. Achmad Rinaldi Hidayat, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	500.000
		5. Husaini, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	500.000
		6. Andri Satriajati, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Kementerian Dalam Negeri	500.000
		7. Bayu Noor Cahyanto, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Kementerian Dalam Negeri	500.000
		8. Pranoto, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
		9. Wijasena Hendra Kurniawan, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000

		10. Agus Budi Priyono, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Wilayah III, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	500.000
		11. Minang Firmansyah, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Wilayah III, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	500.000
		12. Wenwen Ruswendi, Direktorat Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	500.000
		13. Patria Susantosa	500.000
		14. Dodi Wahyugi	500.000
		15. R. Adha Pamekas	500.000
		16. Widya Prima Sari Fultanegara	500.000
		17. Dara Kumala Arumbuana	500.000
		18. Himawan Giri Dahlan	500.000
		19. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
		20. Mohamad Irvan Faradian	500.000
		21. Aloysius Sigit Wicaksono	500.000
		22. Andri Priyo Utomo	500.000
		23. Nuraini Darmastuti	500.000
		24. Eva Nurdinna Agustini	500.000
		25. Eva Ayuga Ningrum	500.000
		26. Frans Yoenero	500.000
		27. Biantri Raynasari	500.000
		28. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
		29. Mahfuzan Zakaria	500.000
		30. Winny Adlina Pratomo	500.000
		31. Adi Afrianto	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO